

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek merupakan suatu lembaga keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga dan beredar. Bursa efek ini berfungsi untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*) adalah pasar modal di Indonesia, yang merupakan gabungan dari dua bursa efek yakni, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penggabungan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi daya saing di kawasan regional.

Jumlah perusahaan yang *go public* mengalami peningkatan yang signifikan, dilihat dari jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga Desember 2012 sebanyak 451 emiten. Saham-saham ini diperdagangkan untuk menarik para investor menanamkan modal pada emiten yang terdaftar sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan bisnis mereka. Bagi investor, memilih investasi di Bursa Efek Indonesia dapat memperlihatkan nilai investasi mereka mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini tercermin dari peningkatan harga saham investasi yang mencapai *capital gain*. Industri perbankan adalah suatu industri yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup orang banyak (www.bi.go.id).

Perusahaan perbankan, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang finansial dan menjalankan fungsi intermediasi dimana satu pihak mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan di lain pihak dana yang berhasil dikumpulkan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Investasi

pada saham perusahaan perbankan termasuk cukup berisiko karena jenis perusahaan ini rentan terhadap kondisi perekonomian pada umumnya.

Industri perbankan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan sektor industri lain dilihat dari beberapa karakteristik utama yang dimilikinya. Karakteristik pertama adalah industri yang padat akan regulasi dan yang kedua adalah industri ini merupakan industri yang berbasis kepada kepercayaan. Semakin kompleksnya resiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik *good corporate governance* oleh perbankan, pelaksanaan *good corporate governance* ditujukan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank Indonesia mengagagas peraturan mengenai ketentuan pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum di peraturan bank Indonesia No.8/4/PBI/2006.

Perbankan di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori bank menurut Bank Indonesia yaitu Bank Umum Persero (BUMN Pemerintah), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran (Domestik dan Asing), dan Bank Asing.

Pada penelitian ini Bank Umum Swasta dan Pembangunan Daerah yang digunakan sebagai objek penelitian karena penerapan *corporate governance* kategori bank ini dapat dikatakan masih kurang baik bila dibandingkan dengan penerapan *good corporate governance* pada Bank Umum Persero. Dalam Bank Umum Persero aturan dibuat untuk diberlakukan didalam perusahaan dan diterapkan oleh institusi yang membawahi Bank Umum Persero tersebut dalam hal ini oleh pemerintah. Aturan merupakan salah satu mekanisme untuk membuat berfungsinya *good corporate governance* pada Bank Umum Persero. Sedangkan pada Bank Umum Swasta dan Bank Pembangunan Daerah salah satu penghambat penerapan konsep *good corporate governace* adalah banyaknya campur tangan keluarga (*family business*) atau pihak internal yang ikut menentukan kebijakan aturan dalam perusahaan. Menerapkan *good corporate governance* bagi

perusahaan keluarga sangat sulit apalagi bila dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh pemilik perusahaan. (Hestikawati dan Andayani, 2007)

Berikut ini daftar perusahaan jasa sektor keuangan, sub sektor bank yang terdaftar sebagai perusahaan publik (emiten) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Tahun 2013

No	Kode Saham	Nama Emiten	No	Kode Saham	Nama Emiten
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	19	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
2	BABP	Bank ICB Bumi Putra Tbk	20	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk
3	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk	21	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
4	BAEK	Bank Ekonomi Raharja Tbk	22	BNII	Bank Internasional Indonesia Tbk
5	BBCA	Bank Cetrnal Asia Tbk	23	BNLI	Bank Permata Tbk
6	BBKP	Bank Bukopin Tbk	24	BSIM	Bank Sinar Mas Tbk
7	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk	25	BSWD	Bank Swadesi Tbk
8	BBNI	Bank Negara Indoesia (Persero) Tbk	26	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
9	BBNP	Bank Nusantara Pahrayangan Tbk	27	BVIC	Bank Victoria Internasional Tbk
10	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk
11	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk

(Bersambung)

(Sambungan)

12	BCIC	Bank Mutiara Tbk	30	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional Tbk
13	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk	31	MEGA	Bank Mega Tbk
14	BEKS	Bank Pundi Indonesia Tbk	32	NAGA	Bank Mitra Niaga Tbk
15	BJBR	Bank Jabar Banten Tbk	33	NISP	Bank NISP OCBC Tbk
16	BJTN	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	34	NOBU	Bank Nationalnoba Tbk
17	BKSW	Bank Kesawan Tbk	35	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
18	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk	36	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk

Sumber : www.sahamok.com

1.2 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh investor dalam menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan harus mampu menyajikan informasi yang relevan agar dapat dipergunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan investasinya menggunakan informasi. Salah satu informasi yang banyak dipergunakan adalah informasi akuntansi, terutama informasi yang berasal dari laporan keuangan (Widyastuti, 2009). Seiring dengan kegunaan dari laporan keuangan tersebut maka laporan keuangan harus disajikan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.

Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau prestasi manajemen. Selain itu informasi laba juga digunakan oleh investor atau pihak lain yang berkepentingan sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yg tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian dan indikator untuk kenaikan kemakmuran (Ghozali dan Chariri, 2007:350).

Menurut Siregar dan Utama (2005), dalam laporan keuangan, salah satu parameter untuk mengukur kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai

dasar pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Meski sebenarnya semua laporan keuangan adalah penting dan bermanfaat, namun kebanyakan investor dan pemakai laporan keuangan lainnya hanya memusatkan perhatian mereka pada laba. Seringkali perhatian investor yang hanya terfokus pada laba membuatnya tidak memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan angka laba tersebut. Ketergantungan investor, pihak eksternal terhadap informasi laba yang terdapat dalam laporan keuangan, turut mendorong manajer melakukan *earning management* atau manajemen laba untuk kepentingan sendiri.

Manajemen laba (*earning management*) dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) (Herawati, 2008). Menurut Richardson (1998) dalam Rosaria (2010) adanya asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earning management*).

Fenomena manajemen laba juga telah meramaikan dunia bisnis dan pemberitaan pers. Gu dan Lee (1999) telah menunjukkan bahwa manajemen laba telah meluas dan ada di setiap pelaporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan.

Tindakan *earnings management* telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat. Kasus pada perusahaan perbankan yang terjadi di Indonesia adalah PT. Bank Lippo Tbk (Boediono, 2005).

Pada kasus ini pencantuman kata "*audited*" pada Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 membawa implikasi pada perhitungan akun-akun didalamnya yang terlihat baik namun sesungguhnya bukan keadaan yang sebenarnya. Laporan Keuangan yang disampaikan ke publik tanggal 28 November 2002 mencatat total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 24,185 triliun, laba tahun berjalan sebesar Rp. 98,77 miliar dan CAR sebesar 24,77%. Sekilas dengan

membaca Laporan ini, Investor melihat bahwa kinerja perusahaan berjalan dengan bagus. Dengan demikian keputusan-keputusan yang diambil Investor akan menguntungkan perusahaan, misalnya Investor akan melakukan pembelian saham PT. Bank Lippo Tbk secara besar-besaran. Hal ini tentunya merugikan Investor sebab dengan dasar informasi yang salah maka keputusan yang diambil juga tidak tepat. (Bapepam, 2003).

Oleh sebab itu, informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan, seringkali menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginan. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba (*Earnings Management*) (Purnomo dan Pratiwi, 2009).

Dan kemudian konsep *corporate governance* (tata kelola perusahaan) diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Di era globalisasi ini, istilah *corporate governance* menjadi semakin populer dan ditempatkan di posisi terhormat untuk sebuah faktor perusahaan publik. Hal tersebut setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, *corporate governance* yang baik merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk terus memperluas kapasitasnya dan menjadi lebih menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global yang semakin kompetitif. Kedua, adanya krisis ekonomi dunia yang melanda sebagian negara-negara di Asia dan Amerika yang diyakini muncul karena adanya gagalnya penerapan *corporate governance* yang baik. Seperti, sistem *regulatory* yang buruk, Standar Akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah dan pandangan Dewan Direksi yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Berdasarkan situasi inilah, penyelesaian terbaik dari masalah ini yaitu dengan penerapan mekanisme *corporate governance*, karena dengan adanya mekanisme *corporate governance* akan memberikan pengawasan terhadap kegiatan

operasional perusahaan. Hal ini didukung oleh argumen Watts (2003) yang dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), menyatakan bahwa “ salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*.”

Mekanisme *corporate governance* yang dijalankan sesuai dengan standar dan prosedur perusahaan akan dapat meminimalisir tindakan manajemen perusahaan yang melenceng terutama agar tidak mengarah kepada praktik manajemen laba yang dapat mengancam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Penerapan mekanisme GCG secara konsisten juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat menghambat terjadinya manajemen laba sehingga dapat menggambarkan kinerja fundamental perusahaan yang baik (Anggana dan Prastiwi, 2013).

Agrawal and Knoeber, (1996) menjelaskan bahwa pembagian mekanisme *corporate governance* menjadi dua kelompok, eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui *outsiders*. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, *outside block holdings*, dan kegiatan *takeover*. Pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, *supplier*, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta *stakeholder* lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan direksi, sekretaris perusahaan, dan manajemen. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemegang saham internal, anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar perusahaan), komite remunerasi, dan pembiayaan hutang.

Perusahaan perbankan merupakan perusahaan “kepercayaan”, sehingga apabila perusahaan diketahui melakukan tindak manajemen laba otomatis kepercayaan investor akan berkurang dan satu persatu ataupun bersama-sama akan melakukan penarikan dana sehingga bisa menimbulkan *rush* (penarikan dana secara besar-besaran) yang kemudian akan merugikan bank tersebut bahkan menyebabkan bank tersebut *collapse* (bangkrut). Bank Indonesia selaku regulator lembaga

perbankan telah mengeluarkan banyak peraturan yang terkait langsung dengan upaya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dibentuk tahun 2004; Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari tahun 2009); dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang intinya bertujuan untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, transparansi, dan pelaksanaan GCG dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Indriastuti, 2012).

Menurut Natalia (2013) laporan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) 2004, pengelolaan badan usaha masih sangat lemah, salah satunya yang terjadi pada sektor perbankan. Pelaksanaan *good corporate governance* masih belum diterapkan secara konsisten dan maksimal pada badan usaha termasuk sektor perbankan. Padahal sektor perbankan merupakan faktor pendukung perekonomian di Indonesia.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah dalam Kompas.com pada 24 Juni 2013 mengatakan Bank Sentral melihat terjadinya kasus-kasus empat bank karena adanya kelemahan terhadap tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Empat bank tersebut yaitu PT Bank Mega Tbk (MEGA), PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Bank Panin Tbk (PNBP), dan PT Mestika Dharma Tbk. Berdasarkan laporan IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*) tahun 2013 dalam www.tempo.com mengumumkan 30 perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia sebagai 30 emiten teratas dengan skor *corporate governance* tertinggi termasuk PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (nomer urut 3) dan PT Bank Panin Tbk (nomer urut 23). Hal ini mengindikasikan *corporate governance* yang diterapkan terhadap perbankan di Indonesia masih belum stabil, mengenai penetapan indikator penilaian skor baik yang dilakukan IICD maupun Bank Sentral.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut yang dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme *monitoring* yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut.

Pertama, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd et al. (1998) dalam Pratana dan Mas'ud (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor *agent* dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang.

Kedua, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer.

Ketiga, melalui peran *monitoring* oleh dewan komisaris (*board of directors*). Dechow et al. (1996) dan Beasley (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Proporsi dewan komisaris independen merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Keempat, Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terdapat *research gap* yaitu perbedaan hasil penelitian pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap praktik manajemen laba. Dalam beberapa penelitian terdahulu Indriastuti (2012) dan Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, sedangkan menurut

Rahmawati (2013) berdasarkan pengujian secara parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba.

Menurut penelitian yang dilakukan Indriastuti (2012) menyatakan terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan insitusal terhadap manajemen laba, berbeda dengan penelitian Heni, Triyono, dan Syamsudin (2011) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Penelitian terdahulu lainnya Indriastuti (2012), Rahmawati (2013), dan Boediono (2005) menyimpulkan tidak terdapat pengaruh negatif antara proposi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba, berbeda dengan penelitian Heni, Triyono, dan Syamsudin (2011) yang menyatakan terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan proposi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.

Panggabean (2011) menyatakan terdapat pengaruh negatif antara komite audit terhadap manajemen laba, sedangkan menurut Heni, Triyono, dan Syamsudin (2011) berdasarkan pengujian secara parsial komite audit tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, penulis mengambil judul:

“PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013)”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara simultan.

3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia :
 - a. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.
 - b. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.
 - c. Bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.
 - d. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.
- c. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.
- d. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi peneliti

Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit) Terhadap Manajemen Laba khususnya sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi pihak akademis

Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat kepada perusahaan dalam mengimplimentasikan *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang melakukan praktik *Good Corporate Governance*

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini terdapat landasan teori yang berhubungan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini dan saran yang diberikan.